

**PENGARUH TINGKAT PEMAHAMAN, PELATIHAN DAN
PENDAMPINGAN APARATUR PEMERINTAH DAERAH TERHADAP
PENERAPAN ACCRUAL BASIS DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN
DAERAH DI KABUPATEN JEMBER
(STUDI KASUS PADA DINAS PEMERINTAHAN KABUPATEN JEMBER)**

¹Halen, ²Diana Dwi Astuti

¹Mahasiswa STIE Mandala Jember

¹Dosen Program Studi Akuntansi STIE Mandala Jember

Abstract

The study, entitled "Effect of Understanding, Training and Mentoring Against Local Government Reform Implementation of Accrual Basis in Financial Management in Jember (case study at the county government office Jember)". Objective: to determine the effect of simultaneous partial and independent variables (level of understanding, training and mentoring) local government officials on the dependent variable (accrual basis) in the financial management area in Jember district. Samples of this study were all in the district offices as SKPD Jember in charge records and create financial reports (financial section). To determine the effect of independent variables on the dependent variable distributing questionnaires in the financial section of each department. The questionnaire consisted of closed questions where measurement using likkert scale. With five levels, namely strongly agree, agree, disagree, disagree and strongly disagree or very familiar, familiar, less familiar, very less and do not know at all. Through the deployment of the questionnaire, the respondent's answer is then supplied to a predetermined value and then tabulated. Furthermore the raw data were analyzed using multiple linear regression, the data quality test which consists of test validity and reliability test, F test and t test. The results of calculations performed turned out that the influence of independent variables (level of understanding, training, mentoring) or partially simultaneously have a significant influence on the dependent variable (the application of accrual basis).

Key words: level of understanding, training, mentoring, accrual basis

PENDAHULUAN

Melalui peraturan pemerintah (PP) nomor 71 tahun 2010, pemerintahan menetapkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), dan selanjutnya dikembangkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) menggunakan *accrual basis*. Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah wajib melaksanakan SAP berbasis akrual. Tujuannya untuk peningkatan kualitas laporan keuangan guna meningkatkan kredibilitas dan mewujudkan transparansi serta akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintahan daerah. KSAP mengacu pada praktik-praktik terbaik internasional, diantaranya dengan mengadaptasi *Internasional Publik Sector Accounting Standards* (IPSAS) yang diterbitkan oleh *Internasional Federation of Accountant* (IFAC). Prinsip pengembangan SAP berorientasi pada IPSAS yang disesuaikan dengan kondisi Indonesia dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, praktik-praktik akuntansi yang berlaku, dan kesiapan sumber daya pengguna SAP.

SAP mengatur tiga hal, yaitu; (1) mengatur masalah pengakuan yang membahas kapan suatu transaksi diakui untuk dicatat, (2) mengatur masalah pengukuran yang membahas bagaimana menetapkan nilai uang untuk dicatat dalam pos-pos laporan keuangan, dan (3) mengatur masalah pengungkapan basis akuntansi yaitu masalah pengakuan transaksi. Untuk menentukan kapan suatu transaksi dicatat, digunakan basis akuntansi atau sistem pencatatan.

Sampai dengan tahun 2011, belum sepenuhnya dinas di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember melaksanakan P.P. Nomor 71 tahun 2010. Kendala yang dihadapi Pemkab Jember antara lain, kurangnya tingkat pemahaman *accrual basis*, tenaga akuntan sangat terbatas, pelatihan telah dilakukan tetapi belum maksimal karena basis akuntansi ini dirasa lebih sulit jika dibandingkan dengan pengakuan transaksi yang berbasis kas, dan pendampingan pengelola keuangan oleh tenaga ahli belum dilakukan secara merata dan berkesinambungan. Berdasarkan kondisi di atas, pertanyaannya adalah; apakah ada pengaruh tingkat pemahaman, pelatihan dan pendampingan aparatur pemerintah daerah terhadap penerapan *accrual basis* dalam pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Jember?

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

Tujuan penelitian untuk mengetahui pengaruh tingkat pemahaman, pelatihan dan pendampingan aparatur pemerintah daerah terhadap penerapan *accrual basis*) dalam pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Jember. Beberapa manfaat penelitian adalah:

1. Untuk dapat lebih mengenal basis akrual (*accrual basis*) yang selanjutnya dapat digunakan untuk mengambil kebijakan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah dan juga untuk memudahkan dalam pembuatan laporan keuangan.
2. Sebagai referensi dan pengujian dalam melakukan penelitian tentang tingkat pemahaman, pelatihan dan pendampingan aparatur pemerintah daerah terhadap penerapan *accrual basis* atas pengakuan transaksi dalam pengelolaan keuangan daerah.

LINGKUP PENELITIAN

Penelitian dilakukan terbatas pada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pada pemerintah Kabupaten Jember. Sampel dalam penelitian ini dibatasi hanya pada dinas sesuai dengan tehnik *purposive sampling* yang meliputi Dinas Pasar, Kehutanan dan Perkebunan, Kesehatan, Koperasi UMKM, Pendapatan Daerah, Dinas Pendidikan, Kependudukan dan Capil, Perindag dan penanam modal, Pertanian, PU. Bina Marga, Dinas PU. Cipta Karya, Dinas Pengairan, Peternakan dan Ikan, Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Infokom/Humas, Kebersihan dan Lingkungan Hidup, Pariwisata dan Kebudayaan, dan Dinas Perhubungan.

TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian yang dilakukan oleh Masluhatul Muniroh (2008), tentang persepsi tingkat pemahaman, peran pendampingan dan peran pelatihan bagi aparatur pemerintah daerah Kabupaten Jember terhadap penerapan basis akuntansi *cash toward accrual* disimpulkan bahwa; (1) banyak aparatur pemerintah yang belum paham dengan basis akuntansi basis akuntansi *cash toward accrual*. (2) pendampingan masih belum dilakukan secara rutin dan berkesinambungan, meskipun pengelolaan keuangan daerah tergolong baik, dan (3) aparatur pemerintah setuju jika diadakan pelatihan secara berkesinambungan.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian Masluhatul Muniroh adalah menggunakan variabel independen yang sama. Perbedaannya adalah; (1) Peraturan pemerintah yang digunakan pada penelitian terdahulu menggunakan PP. No. 58 tahun 2005 sedangkan pada penelitian ini menggunakan PP. No. 71 tahun 2010. (2) Basis akuntansi yang diteliti pada penelitian ini yaitu *accrual basis* sedangkan penelitian terdahulu basis *cash toward accrual*, dan (3) Penelitian terdahulu menggunakan 9 dinas SKPD sedangkan dalam penelitian ini menggunakan 19 dinas SKPD

Pemahaman

Pemahaman dapat diartikan sebagai usaha untuk menafsirkan dan mengungkapkan makna sesuatu pada simbol-simbol, simbol-simbol ini dapat dikatakan berasal dari pemaknaan manusia atau sesuatu, sehingga memaknai simbol berarti usaha untuk menyingkap dan menangkap sesuatu yang terkandung dalam simbol itu (Raharjo, 2008:24).

Pelatihan

Pelatihan adalah suatu proses pendidikan jangka pendek pada karyawan operasional untuk memperoleh keterampilan teknis operasional secara sistematis. Rolf P.Lynton dan Udai Pareek, dalam (www.wikipedia.org) menyatakan, pelatihan mempersiapkan peserta latihan untuk mengambil jalur tindakan tertentu yang dilukiskan oleh teknologi dan organisasi tempat bekerja, dan membantu

peserta memperbaiki prestasi dalam kegiatannya terutama mengenai pengertian dan keterampilan.

Pendampingan

Pendampingan merupakan suatu aktivitas yang dilakukan dan bermakna pada kebersamaan, kesejajaran, samping menyamping, dan karenanya kedudukan antara keduanya (pendamping dan yang didampingi) sederajat, sehingga tidak ada dikotomi antara atasan dan bawahan (www.e-library.com).

Pengakuan dalam Akuntansi

Pengakuan dalam akuntansi menurut SAP adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi unsur asset, kewajiban, ekuitas dana, pendapatan, dan belanja sebagaimana termuat dalam laporan keuangan entitas pelaporan yang bersangkutan (Ditjen BAKD Departemen Dalam Negeri, 2007:21).

Empat kriteria mendasar yang harus dipenuhi sebelum suatu item dapat diakui adalah:

1. Definsi item harus memenuhi salah satu dari tujuh unsur laporan keuangan yaitu aktiva, kewajiban, ekuitas, pendapatan, beban, keuntungan dan kerugian.
2. Item tersebut harus memiliki atribut relevan yang dapat diukur secara andal yaitu karakteristik, sifat atau aspek yang dapat dikuantifikasi dan diukur.
3. Relevansi informasi mengenai item tersebut mampu membuat suatu perbedaan dalam pengambilan keputusan.
4. Reliabilitas informasi mengenai item tersebut dapat digambarkan secara wajar dapat diuji dan netral.

Basis Akrual (*Accrual Basis*)

Menurut Peraturan Pemerintah (PP) nomor 71 tahun 2010 Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) 01 paragraf 8 adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Sesuai dengan PP nomor 71 tentang SAP menyatakan bahwa pendapatan,

belanja, aset, kewajiban dan ekuitas dana diakui atau dicatat berdasarkan basis akrual. Pencatatan dengan basis ini sesuai dengan saat terjadinya arus sumber daya sehingga menyediakan estimasi yang tepat atas pengaruh kebijakan pemerintah terhadap perekonomian secara makro dan juga menyediakan informasi yang paling komprehensif karena seluruh arus sumber daya dicatat termasuk transaksi internal.

Dalam PP. No 71 tentang kerangka konseptual paragraf 64 menjelaskan dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas (*cash basis*), maka Laporan Realisasi Anggaran (LRA) disusun berdasarkan basis kas, berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di rekening kas umum negara/daerah atau oleh entitas pelaporan serta belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari rekening kas umum negara/daerah. Namun demikian, bilamana anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis akrual (*accrual basis*), maka laporan realisasi anggaran disusun berdasarkan basis akrual.

Basis akrual untuk neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Pemerintah masih memberikan kebijakan menggunakan basis kas menuju akrual (*cash toward accrual*) sampai tahun 2015.

Akuntansi Keuangan Daerah

Merupakan proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas pemerintah daerah (kabupaten, kota dan propinsi) yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi yang diperlukan oleh pihak-pihak eksternal entitas pemda (Halim, 2007:42). Pihak eksternal entitas pemda yang memerlukan informasi yang dihasilkan oleh akuntansi keuangan daerah tersebut antara lain adalah DPRD, badan pengawas keuangan, investor, kreditur, donatur, analisis ekonomi, pemerhati pemda, rakyat, pemda lain, dan pemerintah pusat yang

seluruhnya berada dalam lingkungan akuntansi keuangan daerah. Lingkup akuntansi pemerintahan adalah, (1) akuntansi pemerintahan pusat, dan (2) akuntansi pemerintahan daerah, yang terbagi atas akuntansi pemerintahan provinsi dan akuntansi pemerintahan kabupaten/kota.

Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)

Untuk memecahkan berbagai kebutuhan yang muncul dalam pelaporan keuangan akuntansi baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dibentuk Standar Akuntansi Pemerintah (Nordriawan, 2008:120). SAP dikembangkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) diatur dalam PP. No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Dalam kerangka konseptual akuntansi pemerintahan paragraph 42 menyatakan “Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah adalah basis akrual”, SAP berbasis akrual adalah SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN/APBD. Dimana untuk pendapatan, belanja, aset, kewajiban dan ekuitas dana diakui pada saat terjadinya transaksi.

Penyusunan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) dilandasi oleh kerangka konseptual akuntansi pemerintahan, yang merupakan konsep dasar penyusunan dan pengembangan standar akuntansi pemerintahan, dan merupakan acuan bagi Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP), penyusun laporan keuangan, pemeriksa, dan pengguna laporan keuangan dalam mencari pemecahan atas sesuatu masalah yang belum diatur dalam pernyataan standar akuntansi pemerintahan.

Peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang SAP terdiri dari; (1) Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan, (2) PSAP 01 : Penyajian Laporan Keuangan, (3) PSAP 02 : Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas, (4) PSAP 03: Laporan Arus Kas, (5) PSAP 04 : Catatan Atas Laporan Keuangan, (6) PSAP 05: Akuntansi Persediaan, (7) PSAP 06 : Akuntansi Investasi, (8) PSAP 07 : Akuntansi Aset Tetap, (9) PSAP 08 : Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan,

(10)PSAP 09 : Akuntansi Kewajiban, (11) PSAP10: Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Operasi yang Tidak Dilanjutkan, (12) PSAP 11 : Laporan Keuangan Konsolidasian, (13) PSAP 12 : Laporan Operasional

Hipotesis

Hipotesis 1: Diduga ada pengaruh secara simultan variabel independen (tingkat pemahaman, pelatihan dan pendampingan) aparatur pemerintah daerah terhadap variabel dependen (penerapan *accrual basis*) dalam pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Jember

Hipotesis 2 : Diduga ada pengaruh secara parsial/masing-masing variabel independen (tingkat pemahaman, pelatihan dan pendampingan) aparatur pemerintah daerah terhadap variabel dependen (penerapan *accrual basis*) dalam pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Jember

METODE PENELITIAN

Unit Kerja Pemerintah kabupaten Jember

Pemerintahan Kabupaten Jember melingkupi; Sekretariat, yang berfungsi mengatur bagian-bagian yang dipimpin oleh sekretaris daerah dan pengguna anggaran yang terdiri dari; Sekretaris Kabupaten, Asisten Pemerintahan, Kabag Hukum, Kabag Pemerintahan Desa, Plt. Kabag Pemerintahan, Asisten Ekonomi dan Pembangunan, Kabag Ekonomi, Kabag Umum, Kabag Kesejahteraan Sosial, Kabag Penyusunan Program, Asisten Administrasi, Kabag Keuangan, Kabag Organisasi, Kabag Perlengkapan, dan Satuan Polisi Pamong Praja. Badan, berfungsi sebagai perencanaan dan juga sebagai pengguna anggaran yang terbagi menjadi, (1) Badan Kepegawaian Daerah, (2) Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Linmas, (3) Badan Pemberdayaan Masyarakat, (4) Badan Perencanaan dan Pembangunan Kabupaten, (5) Badan Pemberdayaan Perempuan, (6) Inspektorat, dan (7) Sekretaris DPRD. Dinas, merupakan pengguna anggaran yang memiliki pendapatan sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang disetor ke rekening kas daerah (kasda) yang diakui sebagai pendapatan dinas. Seluruhnya ada 19 dinas di

Pemerintah Kabupaten Jember. Kantor, merupakan pengguna anggaran yang terdiri dari Kanpora dan Kantor Perpustakaan dan Arsip. Camat, merupakan pengguna anggaran dan kepala wilayah yaitu sebagai wakil bupati yang ada di wilayah. Seluruhnya ada 31 camat di Pemerintah Kabupaten Jember. Rumah sakit merupakan milik pemerintah yang mengolah sendiri hasil retribusi dan tidak dianggarkan APBD kecuali untuk biaya gaji pegawai. Rumah sakit terdiri dari; RSUD Dr.Soebandi, RSUD Balung, RSUD Kalisat, dan RS.Paru-Paru. Hotel dan BUMD merupakan pengguna anggaran APBD yang juga menjual jasanya untuk kepentingan masyarakat., meliputi Hotel Kebonagung, Hotel Rembangan, Pers.Daerah Air Minum, Pers.Daerah Perkebunan.

Penelitian difokuskan pada bagian keuangan yang mencatat dan mengelola keuangan. Untuk informasi tambahan agar dapat lebih mengerti alur pengakuan dan pencatatan transaksi, peneliti mengambil bagian keuangan pemkab yang merupakan bagian dari sekretariat selaku PPKD yang berfungsi sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD) yang mengelola dan mendistribusikan anggaran ke masing-masing SKPD termasuk dinas. Bagian keuangan pemkab membidangi sub bagian anggaran, sub bagian akuntansi dan sub bagian perbendaharaan dan gaji.

Gambaran Umum Pengakuan Transaksi Dinas di Kabupaten Jember

Permendagri No.13 Tahun 2006 menegaskan yang dimaksud dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran atau pengguna barang. Transaksi akuntansi di Satuan Kerja (satker) secara umum terbagi atas akuntansi pendapatan, belanja, asset, dan transaksi PPKD satker.

Untuk transaksi pendapatan di masing-masing dinas di kabupaten Jember dicatat oleh petugas penatausahaan keuangan satker. Transaksi ini dicatat harian pada saat kas diterima oleh bendahara penerimaan, transaksi yang terjadi adalah penerimaan PAD dengan dokumen sumber berupa surat ketetapan pajak daerah atau surat ketetapan retribusi misalnya dinas pasar yang merupakan penghasil

PAD melalui retribusi pasar yang hasilnya disetor ke rekening kas daerah di bank jatim.

Retribusi dikenakan kepada pedagang yang menempati pasar-pasar milik pemerintah kabupaten seperti pasar tanjung, pasar johar (pedagang kali lima), pertokoan jompo (sebagian masih milik pemerintah daerah), pedagang seafood yang lokasinya disebelah kantor BRI dan juga pedagang yang membuka stand di alun-alun maupun lokasi pemerintah daerah lainnya yang digunakan masyarakat sebagai penghasil perekonomian dikenakan retribusi baik retribusi tahunan, bulanan, mingguan, maupun harian dengan membuat jurnal penerimaan akun kas di bendahara penerimaan disebelah debit dan akun pendapatan disebelah kredit.

Transaksi belanja dicatat oleh petugas penatausahaan keuangan satker. Belanja barang untuk dinas biasanya dilakukan oleh rekanan dalam hal ini CV dimana masing-masing dinas memiliki hubungan kerjasama dengan banyak CV tetapi yang diambil adalah CV yang memberikan penawaran paling murah. CV yang akan menyediakan barang-barang kebutuhan dinas misalnya ATK, pembelian komputer, meja, dll, contohnya untuk belanja ATK tarif pajak yang dikenakan berdasarkan PPh pasal 22 bermacam-macam tergantung nilai nominal belanja tersebut untuk belanja diatas 2 juta dikenakan PPn 10% dan PPh 1,5% untuk belanja 2 juta kebawah hanya dikenakan PPn 10%. Belanja barang yang mendapat potongan pajak yang masih terutang dibayarkan langsung oleh CV yang bersangkutan yang dipotong langsung di SPM.

Dokumen penggunaan anggaran (nota pembelian) diberikan kepada bendahara pengeluaran sebagai dasar untuk membuat Surat Pertanggung Jawab (SPJ). Selanjutnya bendahara pengeluaran mengirimkan Surat Permintaan Membayar (SPM) ke PPKD yakni bagian keuangan pemkab, sub bagian perbendaharaan dan gaji pemkab akan meneliti SPM yang dikirim oleh dinas (SKPD) beserta dokumen pendukung kelengkapannya (nota pembelian) setelah dikoreksi betul, sub bagian ini membuat Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sesuai SPM, kemudian SP2D diajukan ke kabag keuangan yang memiliki fungsi Bendahara Umum Daerah (BUD) untuk ditanda tangani dan SP2D yang berupa

kertas tersebut dikirim ke dinas yang bersangkutan dan dananya dikirim lewat transfer bank jatim.

Transaksi ini dicatat harian pada saat barang diterima (nota pembelian) oleh dinas yang bersangkutan dan timbulnya kewajiban membayar dengan menggunakan jurnal berpasangan (*double entry*). Jika menggunakan basis kas pembelian aset jangka panjang tidak dikapitalisasi tapi seluruhnya diakui sebagai belanja, sehingga tidak ada pencatatan dan penyajian atas aktiva tetap dan penyusutan. Sehingga untuk transaksi belanja, dinas telah menerapkan *accrual basis* karena untuk transaksi belanja modal, pencatatannya dilakukan dengan memposting akun sesuai dengan belanja itu sendiri. Misalnya belanja computer dicatat dengan mengakui belanja modal pengadaan komputer sebelah debit dengan R/K pusat disebelah kredit dan langsung diakui untuk di investasikan dalam aset tetap dimana penggunaannya lebih dari 1 tahun.

Dalam kaitannya dengan transaksi yang menghubungkan dengan tingkat PPKD (bagian keuangan pemda), petugas penatausahaan keuangan di SKPD (dinas) telah menggunakan Rekening Koran (RK) pusat (PPKD) sehingga terdapat kontrol atas anggaran yang diberikan dengan realisasi yang sebenarnya.

Dengan penerapan *accrual basis* yang belum sepenuhnya ini dengan pencatatan yang menggunakan *double entry* (penjurnalan). Laporan keuangan yang dihasilkan dinas antara lain; (1) Laporan Realisasi Anggaran, (2) Neraca, (3) Laporan Operasional / Laporan Fungsional, (4) Laporan perubahan saldo anggaran lebih, (5) Laporan Perubahan Ekuitas, (6) Catatan atas laporan keuangan

Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan kombinasi beberapa metode (kuesioner, observasi, wawancara, dan studi pustaka). Data utama dikumpulkan dengan kuesioner dengan menggunakan skala *likert*. Skala *likert* adalah skala yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, persepsi seseorang tentang fenomena sosial (Sugiyono,2008:107). Melalui skala *likert* variabel yang diukur dijabarkan menjadi indikator variabel, untuk selanjutnya dijadikan titik tolak dalam menyusun item-item yang dapat berupa pertanyaan dan pernyataan. Hasil

jawaban di setiap item instrumen yang menggunakan skala *likert*, akan mempunyai gradiasi sangat positif sampai sangat negative.

Sampel Penelitian

Teknik pemilihan sampel (*sampling*) dalam penelitian ini adalah *Purposive Sampling*. Penelitian ini mengambil sampel dinas dikarenakan dinas merupakan bagian dari pemerintah daerah yang memiliki penghasilan sebagai Penghasilan Asli Daerah (PAD) yang berinteraksi langsung dengan masyarakat sebagai obyek retribusi dan disetorkan ke rekening kasda dan diakui sebagai pendapatan dinas yang bersangkutan. Adapun kriteria pemilihan sampel yang akan diteliti adalah; Pejabat yang mencatat dan melaporkan transaksi ditingkat SKPD, dan Pejabat yang menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang bersangkutan

Populasi SKPD dikabupaten Jember berjumlah 82 yang terdiri dari sekretariat (15), badan (7), dinas (19), kantor (2), camat (31), hotel dan BUMD (4) dan rumah sakit (4). Penelitian dilakukan pada 19 sampel Dinas SKPD, yaitu; Dinas Pasar, Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Dinas Kesehatan, Dinas Koperasi UMKM, Dinas PU. Bina Marga, Dinas PU. Cipta Karya, Dinas Pendapatan Daerah, Dinas Kependudukan dan Capil, Dinas Pengairan, Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup, Dinas Perindag dan Penanam Modal, Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Peternakan dan Perikanan, Dinas Sosial, Dinas Teng Kerja dan Transmigrasi, Dinas Infokom/Humas, Dinas Pendidikan, Dinas perhubungan, dan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.

Definisi Operasional Variabel

(a). Tingkat Pemahaman, adalah sejauh mana seseorang mengerti dalam menafsirkan dan mengungkap makna terhadap sesuatu hal atau simbol-simbol, dengan indikator; pemahaman penerapan *accrual basis*, pengakuan transaksi pendapatan, pengakuan transaksi belanja, pengakuan transaksi asset, pengakuan transaksi kewajiban, dan basis akuntansi.

- (b). Pelatihan, adalah proses untuk mempersiapkan peserta latihan mengambil jalur tindakan tertentu dan membantu peserta memperbaiki presentasi dalam kegiatannya, dengan indikator; peningkatan keterampilan, membantu, mengurangi kesalahan, manfaat, menuntaskan masalah, dan dilakukan dengan berkesinambungan.
- (c). Pendampingan, adalah aktivitas yang dilakukan dapat berupa pembinaan, pengajaran, dan pengarahan dalam kelompok tertentu. Sedangkan peran pendampingan merupakan hal yang besar pengaruhnya atas pendampingan tersebut dengan indicator; kesesuaian dengan kebutuhan, peningkatan keterampilan, membantu, memberi manfaat, menggunakan media dan metode sesuai kebutuhan, dan ketergantungan.

Metode Analisa Data

Data dianalisis dengan metode Regresi Linear Berganda atau *multiple linear regression*, dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh variabel independen yaitu tingkat pemahaman (X_1), pelatihan (X_2) dan pendampingan (X_3) terhadap variabel dependen (Y) yaitu *accrual basis*. Bentuk umum dari persamaan regresi linear berganda dalam aplikasinya adalah sebagai berikut (Supranto, 1996:272) :

$$Y = a + bX_1 + bX_2 + bX_3 + e$$

Y	= Penerapan <i>accrual basis</i>
a	= Konstanta
b	= Koefisien regresi
X_1	= Tingkat Pemahaman
X_2	= Pelatihan
X_3	= Pendampingan
e	= Error (kesalahan regresi)

ANALISIS DATA

Berdasarkan hasil analisis data diperoleh gambaran tentang tingkat pemahaman, pelatihan dan pendampingan aparatur pemerintah daerah terhadap penerapan *accrual basis* dalam pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Jember sebagai berikut:

Tabel 1. Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

Variabel	n	Nilai minimum	Nilai maksimum	Rata-rata	Standar Deviasi
Tingkat Pemahaman (X1)	57	9	30	22,67	3,819
Pelatihan (X2)	57	18	30	24,72	2,704
Pendampingan (X3)	57	19	30	23,88	2,578
<i>Accrual Basis</i> (Y)	57	20	30	23,89	1,896

Sumber : data diolah

Adapun berdasarkan jawaban dengan nilai terendah (sebesar 1), jawaban dengan nilai tertinggi (sebesar 5) dan jumlah item pertanyaan pada masing-masing variabel (berjumlah 6 pertanyaan), maka diperoleh kisaran teoritis untuk masing-masing variabel seperti yang disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2. Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

Kisaran	Kriteria
6,00 – 10,75	Sangat kurang
10,80 – 15,55	Kurang
15,60 – 20,35	Cukup
20,40 – 25,15	Baik
25,20 – 30,00	Sangat baik

Sumber data : Arikuntoro, 2000

Berdasarkan Tabel, tingkat pemahaman terhadap *accrual basis* (X1) dari 6 pertanyaan mempunyai nilai terendah sebesar 9 dan tertinggi sebesar 30. Rata-rata jawaban adalah sebesar 22,67 dengan standar deviasi sebesar 3,819. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata tingkat pemahaman aparatur pemerintah daerah terhadap *accrual basis* mempunyai kriteria baik. Pelatihan (X2) dari 6 pertanyaan mempunyai nilai terendah sebesar 18 dan tertinggi sebesar 30. Rata-rata jawaban adalah sebesar 24,72 dengan standar deviasi sebesar 2,704. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata pelatihan aparatur pemerintah daerah mempunyai kriteria baik. Pendampingan (X3) dari 6 pertanyaan mempunyai nilai terendah sebesar 19 dan tertinggi sebesar 30. Rata-rata jawaban adalah sebesar 23,88 dengan standar deviasi sebesar 2,578. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata pendampingan aparatur pemerintah daerah mempunyai kriteria baik. Penerapan *accrual basis* (Y)

dari 6 pertanyaan mempunyai nilai terendah sebesar 20 dan tertinggi sebesar 30. Rata-rata jawaban adalah sebesar 23,89 dengan standar deviasi sebesar 1,896. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata penerapan *accrual basis* aparatur pemerintah daerah mempunyai kriteria baik.

Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel-variabel tingkat pemahaman (X_1), pelatihan (X_2) dan pendampingan (X_3) terhadap penerapan *accrual basis* (Y). Pada penelitian ini untuk mengolah data yang telah dikumpulkan dari penyebaran kuesioner selama penelitian diproses dengan menggunakan paket statistik *SPSS Release 13.0 for Windows*.

Berdasarkan hasil perhitungan analisis regresi linear berganda diperoleh rekapitulasi hasil sebagaimana disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Rekapitulasi Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

No	Variabel Bebas	Koefisien regresi	Penyajian Hipotesis		r	Sig.
			t-hitung	t-tabel		
1.	Tingkat pemahaman (X_1)	0,138	2,466	2,006	0,321	0,017
2.	Pelatihan (X_2)	0,211	2,329		0,305	0,024
3.	Pendampingan (X_3)	0,212	2,145		0,283	0,037
Konstanta		= 10,498				
Adjusted R^2		= 0,499				
R^2		= 0,526				
Signifikansi		= 0,000				
F-hitung		= 19,584				
F-tabel (5%,3,53)		= 2,779				

Sumber: data diolah

Berdasarkan analisis regresi linear berganda, maka dapat dihasilkan persamaan regresi sebagai berikut :

$$Y = 10,498 + 0,138 X_1 + 0,211 X_2 + 0,212 X_3$$

Dari persamaan regresi linear berganda di atas dapat dilihat pengaruh dari variabel-variabel independen (tingkat pemahaman, pelatihan, pendampingan) terhadap variabel dependen (penerapan *accrual basis*), sedangkan makna dari persamaan regresi linear berganda di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Konstanta persamaan regresi (b_0) bernilai positif sebesar 10,498, berarti bahwa jika variabel-variabel tingkat pemahaman (X_1), pelatihan (X_2) dan pendampingan (X_3) sama dengan nol, maka penerapan *accrual basis* adalah sebesar 10,498.
- b. Koefisien regresi variabel tingkat pemahaman (b_1) bernilai positif sebesar 0,138, berarti bahwa peningkatan tingkat pemahaman sebesar 1 satuan maka akan terjadi peningkatan penerapan *accrual basis* sebesar 0,138 satuan dengan asumsi variabel-variabel bebas lainnya konstan.
- c. Koefisien regresi variabel pelatihan (b_2) bernilai positif sebesar 0,211, berarti bahwa peningkatan pelatihan sebesar 1 satuan maka akan terjadi peningkatan penerapan *accrual basis* sebesar 0,211 satuan dengan asumsi variabel-variabel bebas lainnya konstan.
- d. Koefisien regresi variabel pendampingan (b_3) bernilai positif sebesar 0,212, berarti bahwa peningkatan pendampingan sebesar 1 satuan maka akan terjadi peningkatan penerapan *accrual basis* sebesar 0,212 satuan dengan asumsi variabel-variabel bebas lainnya konstan.

Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis yang dilaksanakan adalah pengujian koefisien regresi secara simultan (bersama-sama) dengan menggunakan uji F dan pengujian koefisien regresi secara parsial (individu) dengan menggunakan uji t. Hasil pengujian hipotesis dalam penelitian ini disajikan dalam penjelasan sebagai berikut.

Pengujian Hipotesis Koefisien Regresi Secara Simultan dengan Uji F

Pengujian ini dimaksudkan untuk mengetahui pengaruh variabel-variabel independen (tingkat pemahaman, pelatihan, pendampingan) terhadap variabel dependen (penerapan *accrual basis*) secara simultan (bersama-sama).

Langkah-langkah pengujiannya adalah sebagai berikut :

1. $H_0 : b_j = 0$, berarti secara simultan tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel X_1, X_2, X_3 terhadap Y .

$H_1 : b_j \neq 0$, berarti secara simultan terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel X_1, X_2, X_3 terhadap Y .

2. $\alpha = 0,05$

3. Kriteria pengujian :

– H_0 diterima, apabila $F\text{-hitung} < F\text{-tabel}$, berarti secara simultan tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel X_1, X_2, X_3 terhadap Y .

– H_0 ditolak, apabila $F\text{-hitung} \geq F\text{-tabel}$, berarti secara simultan terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel X_1, X_2, X_3 terhadap Y .

4. $F\text{-tabel} = 2,779$

$F\text{-hitung} = 19,584$

Nilai $F\text{-hitung}$ sebesar 19,584 ($p = 0,000$) dan nilai $F\text{-tabel}$ sebesar 2,779, maka $F\text{-hitung} > F\text{-tabel}$ ($19,584 > 2,779$), berarti bahwa variabel-variabel independen (tingkat pemahaman, pelatihan, pendampingan) secara simultan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen (penerapan *accrual basis*).

Pengujian Hipotesis Koefisien Regresi Secara Parsial dengan Uji t

Untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial digunakan uji t, dimana pengujian ini membandingkan antara $t\text{-hitung}$ dengan $t\text{-tabel}$ hasil dari pengujian terhadap masing-masing variabel tingkat pemahaman, pelatihan dan pendampingan terhadap penerapan *accrual basis*.

Langkah-langkah pengujiannya adalah sebagai berikut :

1. $H_0 : b_j = 0$, berarti secara parsial tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel X_1, X_2, X_3 terhadap Y .

$H_1 : b_j \neq 0$, berarti secara parsial terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel X_1, X_2, X_3 terhadap Y .

2. $\alpha = 0,05$

3. Kriteria pengujian :

- H_0 diterima, apabila $-t\text{-tabel} < t\text{-hitung} < t\text{-tabel}$, berarti secara parsial tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel X_1, X_2, X_3 terhadap Y .
- H_0 ditolak, apabila $t\text{-hitung} < -t\text{-tabel}$ atau $t\text{-hitung} \geq t\text{-tabel}$, berarti secara parsial terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel X_1, X_2, X_3 terhadap Y .

Tabel 4. Rekapitulasi Hasil Uji t

Variabel	t-hitung	t-tabel	Sig.
Tingkat pemahaman (X_1)	2,466	2,006	0,017
Pelatihan (X_2)	2,329		0,024
Pendampingan (X_3)	2,145		0,037

Sumber : data diolah

Berdasarkan langkah-langkah uji t dan Tabel di atas, maka hasil pengujian hipotesis secara parsial untuk masing-masing variabel independen tingkat pemahaman, pelatihan dan pendampingan terhadap penerapan *accrual basis* adalah sebagai berikut :

1) Variabel Tingkat pemahaman (X_1)

Berdasarkan tabel di atas diketahui nilai t-hitung variabel tingkat pemahaman adalah sebesar 2,466 dengan nilai probabilitas sebesar 0,017, sedangkan nilai t-tabel adalah sebesar 2,006, sehingga $t\text{-hitung} > t\text{-tabel}$ ($2,466 > 2,006$). Hal ini menunjukkan bahwa variabel tingkat pemahaman secara parsial mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penerapan *accrual basis*.

2) Variabel Pelatihan (X_2)

Berdasarkan tabel di atas diketahui nilai t-hitung variabel pelatihan adalah sebesar 2,329 dengan nilai probabilitas sebesar 0,024, sedangkan nilai t-tabel adalah sebesar 2,006, sehingga $t\text{-hitung} > t\text{-tabel}$ ($2,329 > 2,006$). Hal ini menunjukkan bahwa variabel pelatihan secara parsial mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penerapan *accrual basis*.

3) Variabel Pendampingan (X_3)

Berdasarkan tabel di atas diketahui nilai t-hitung variabel pendampingan adalah sebesar 2,145 dengan nilai probabilitas sebesar 0,037, sedangkan nilai t-tabel adalah sebesar 2,006, sehingga t-hitung > t-tabel ($2,145 > 2,006$). Hal ini menunjukkan bahwa variabel pendampingan secara parsial mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penerapan *accrual basis*.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Kesimpulan yang didapat dalam penelitian dapat diuraikan di bawah ini:

1. Berdasarkan persamaan uji regresi linear berganda yaitu ;

$Y = 10,498 + 0,138 X_1 + 0,211 X_2 + 0,212 X_3$, dapat dilihat pengaruh variabel-variabel independen (tingkat pemahaman, pelatihan dan pendampingan) terhadap variabel dependen (penerapan *accrual basis*) adalah konstan. Dimana konstanta persamaan regresi (b_0) bernilai positif sebesar 10,498, koefisien regresi variabel tingkat pemahaman (b_1) bernilai positif sebesar 0,138, koefisien regresi variabel pelatihan (b_2) bernilai positif sebesar 0,211, dan koefisien regresi variabel pendampingan (b_3) bernilai positif sebesar 0,212. Diperkuat dengan hasil pengujian dengan uji F dinyatakan bahwa variabel-variabel independen (tingkat pemahaman, pelatihan, pendampingan) secara simultan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen (penerapan *accrual basis*) dengan nilai F-hitung sebesar 19,584 ($p = 0,000$) dan nilai F-tabel sebesar 2,779, maka F-hitung > F-tabel ($19,584 > 2,779$).

2. Pengujian dengan uji t, disimpulkan bahwa pengaruh variabel independen (tingkat pemahaman, pelatihan dan pendampingan) secara parsial adalah signifikan dengan tingkat perhitungan masing-masing variabel yang telah dilakukan. Variabel tingkat pemahaman nilai t-hitung sebesar 2,466 dengan nilai probabilitas sebesar 0,017, sedangkan nilai t-tabel adalah sebesar 2,006, sehingga t-hitung > t-tabel ($2,466 > 2,006$). Variabel pelatihan nilai t-hitung sebesar 2,329 dengan nilai probabilitas sebesar 0,024, sedangkan nilai t-tabel

adalah sebesar 2,006, sehingga $t\text{-hitung} > t\text{-tabel}$ ($2,329 > 2,006$) dan variabel pendampingan nilai $t\text{-hitung}$ sebesar 2,145 dengan nilai probabilitas sebesar 0,037, sedangkan nilai $t\text{-tabel}$ adalah sebesar 2,006, sehingga $t\text{-hitung} > t\text{-tabel}$ ($2,145 > 2,006$).

Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan yang diperoleh, terkait erat dengan agenda penelitian ke depan dapat dikemukakan beberapa implikasi hasil penelitian yang lebih sempurna dengan topik yang sama, dengan saran sebagai berikut:

1. Melakukan banyak penyuluhan sesuai dengan topik yang dibahas dalam hal ini *accrual basis* dan melakukan hubungan kerjasama dengan perguruan tinggi yang berada di kabupaten Jember khususnya jurusan akuntansi. Pelatihan aparatur pemda disarankan agar dilaksanakan secara rutin dan berkesinambungan terlebih khusus jika ada peraturan pemerintah yang terbaru diharapkan secepat mungkin melakukan sosialisasi dengan SKPD yang ada. Dan untuk pendampingan disarankan agar sering turun ke lapangan (SKPD) sehingga dapat mengerti kesulitan dan masalah yang dihadapi oleh masing-masing SKPD.
2. Penelitian mendatang sebaiknya memperluas area survey atau menggunakan objek yang lebih variatif, tidak hanya dilingkungan pemerintah Kabupaten Jember. Karena setiap daerah memiliki karakteristik tersendiri dalam penerapan pengelolaan keuangan daerah.
3. Penambahan variabel penelitian.
4. Aparatur pemerintah harus lebih mengikuti perkembangan peraturan-peraturan terbaru terlebih khusus yang menggunakan istilah asing.
5. Pemerintah Kabupaten Jember diharapkan memperbaiki pengelolaan keuangan daerah dengan terus menerus mempelajari teknis akuntansi yang seharusnya diterapkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikuntoro, Suharsimi. 2000. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. PT. Bina Aksara. Jakarta.
- Bastian, Indra.2006. *Sistem Akuntansi Sektor Publik*, Edisi Kedua. Salemba Empat. Jakarta.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2001. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga. Balai Pustaka. Jakarta.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2003. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Edisi Keempat. Balai Pustaka. Jakarta.
- Ditjen BAKD Departemen Dalam Negeri, 2007. *Modul Akuntansi Pemerintah Daerah*Departemen Dalam Negeri. Jakarta.
- Gujarati, Damodar. 2006. *Dasar-Dasar Ekonometrika*.Erlangga. Jakarta.
- Halim,Abdul.2007. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat. Jakarta.
- Indriantoro,Nur dan Bambang Supomono.2002. *Metode Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*.BPFE. Yogyakarta.
- International Federation of Accountants, *IFAC Handbook of International Public Sector of Accounting Standards Board*,<http://www.ifac.org>.
- Mulyana,Deddi.2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Nordiawan,Deddi.2008.*Akuntansi Sektor Publik*. Salemba Empat. Jakarta.
- Pemerintah RI,2010.Peraturan Pemerintah nomor 71 Tahun 2010, *tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2005.
- Purwodarminto,1999. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka. Jakarta.
- Raharjo, Mudjia.2008.*Dasar-Dasar Hermeneutika: Antara Intensionalisme dan Gademerian*. Ar-ruz Media. Yogyakarta.
- Peraturan Pemerintah Nomor 65-66 Tahun 2001.
- Rochaety,Ety.,Ratih.T,&Abd.Madjid.2007. *Metode Penelitian Bisnis dengan Aplikasi SPSS*. Mitra Wacana Media. Jakarta.

Ruppel,Warren.2004. *GAAP for Government-Interpretation and Application of GAAP for State and Local Governments*.USA:John Wiley & Sons,INC.

Sugiyono.2008.*Metode Penelitian Administrasi*. Alfabeta. Bandung.

Suprpto, J. 1993. *Statistik Teori dan Aplikasi*. Jilid I.Erlangga. Jakarta.

Suryanovi,Sri.2008. *Jurnal Akuntansi Pemerintah Kajian Standar Akuntansi Pemerintahan, Keharmonisan dan Kejelasan Penerapan Basis Kas Menuju Akrual Berdasarkan Perspektif UU Nomor 17 Tahun 2003 dan II Nomor 1 Tahun 2004*. www.ksap.org.

Suardjono.2006. *Teori Akuntansi Perekayasaan Pelaporan Keuangan*. BPFE. Yogyakarta:.

Umar,Husein.2003.*Metode Risert Akuntansi Terapan*. Ghalia Indonesia. Jakarta.

Winardi.2002. *Perilaku dalam Organisasi*. Gramedia Utama. Jakarta.

www.e-library.com

www.wilkipedia.com